

**DAMPAK ASEAN – CHINA *FREE TRADE AREA* (AFTA) TERHADAP
PERKEMBANGAN EKSPOR *CRUDE PALM OIL* (CPO) INDONESIA
KE TIONGKOK**

Oleh: Lisa Pratama

lisapratama17@gmail.com

Pembimbing: Dr. Syafri Harto, M.Si

***Bibliography* : 9 Jurnal, 12 Buku, 12 Situs, 2 Laporan, 2 Keputusan Presiden**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional- Konsentrasi Ekonomi Politik Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research aim to explain about the effect of the implementation of ASEAN - China Free Trade Area (ACFTA) on the development of Crude Palm Oil (CPO) export from Indonesia to Tiongkok. ACFTA is an agreement between the members of ASEAN and Tiongkok to make free trade. This research uses the qualitative descriptive as the method and secondary is the techniques of collection data. Furthermore author uses the liberalism perspective with nation state as the level of analysis and uses the international trade with competitive advantage theories by David Ricardo. The result of this research show the export of Indonesian's Crude Palm Oil (CPO) to Tiongkok having an increase since was implemented of ASEAN –China Free Trade Area in 2010, and the production of Indonesian's Crude Palm Oil increased after the ASEAN – China Free Trade Agreement applied

Key Words: Export, Crude Palm Oil, ASEAN- China Free Trade Area, Bilateral relation, Free Trade Area.

PENDAHULUAN

Penelitian ini akan mengkaji masalah tentang “Dampak ASEAN-China *Free Trade Area* terhadap perkembangan ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia ke Tiongkok” ditinjau dari kajian studi ekonomi politik internasional yang merupakan konsentrasi dari penulis. Ekonomi Politik Internasional menurut Mochtar Mas’oed adalah studi tentang saling keterkaitan dan interaksi antara fenomena politik dengan ekonomi, antara negara dengan pasar, antara lingkungan domestik dengan internasional dan antara pemerintah dengan masyarakat.¹

ACFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan oleh negara anggota ASEAN dengan Tiongkok. Zona perdagangan bebas antara ASEAN dan Tiongkok merupakan usulan dari mantan perdana menteri Tiongkok, Zhu Rongji saat berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang ke-6 pada bulan November tahun 2001.² Kemudian disahkan melalui penandatanganan “*Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation*” di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 November 2002.³

Framework yang ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut disepakati penetapan pembentukan perdagangan bebas pada sektor barang di tahun 2004, dalam bidang jasa pada tahun 2007 dan investasi pada tahun 2009. Negara-negara di ASEAN memiliki sumber daya alam yang kaya sehingga dapat memasok kebutuhan industri di Tiongkok, selain itu

kawasan ini dapat menjadi pasar yang besar bagi ekspor Tiongkok.

Pada perjanjian perdagangan barang ACFTA, negara ASEAN dan Tiongkok menyepakati upaya penghapusan ataupun pengurangan hambatan tarif maupun non tarif. Skema penghapusan ini diatur dalam pasal G dimana dinyatakan bahwa liberalisasi penuh akan dilakukan pada 2010 bagi 6 negara anggota ASEAN dan Tiongkok, serta tahun 2015 bagi Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar. Penurunan tarif dilakuk dalam tiga tahap yaitu EHP (*Early Harvest Program*), *Normal Track*, dan *Sensitive Track*.

Indonesia sebagai negara yang ikut terlibat dalam ACFTA telah meratifikasi *Framework Agreement on Comprehensive Economic cooperation between The ASEAN and the People’s Republic of Tiongkok* (ASEAN-Tiongkok) pada tanggal 15 Juni 2004 lewat keputusan presiden Nomor 48 Tahun 2004.⁴ Oleh karena itu mulai Januari 2010 Indonesia harus membuka pasar dalam negeri secara luas ke negara-negara ASEAN dan Tiongkok. Tentunya produk impor dari ASEAN dan Tiongkok juga akan lebih mudah masuk ke Indonesia karena adanya penghapusan tarif dalam jangka beberapa tahun. Begitu juga Indonesia Indonesia yang mendapat kesempatan yang sama untuk memasuki pasar di negara ASEAN dan Tiongkok.

Kegiatan yang dilakukan oleh anggota ACFTA adalah dengan melakukan ekspor-impor. Ekspor-impor

¹Mochtar Mas’oed, *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 4

²<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2012/12/21/asean-Tiongkok-fta-id0-1356076310> diakses pada 17 Februari 2018

³ Sekretariat ASEAN 2012. *Framework Agreement on Comprehensive economic cooperation between the ASEAN and the People’s republic of Tiongkok*. (<http://www.asean.sec.org>) diakses pada 27 Februari 2018

⁴Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive ve Economic Co-Operation between The Association of South East Asian Nations and The People’s Republic of Tiongkok* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50.

merupakan salah satu aktifitas dari perdagangan. Ekspor-impor menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi disuatu negara dan hal penting dalam pencapaian pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekspor yang tinggi akan menghasilkan devisa bagi suatu negara dan selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai impor serta untuk meningkatkan sektor pembangunan dalam negeri. Oleh karena itu, peningkatan ekspor suatu negara dapat tercapai apabila tidak terhalang oleh hambatan apapun dan akan menguntungkan negara tersebut.

Pemerintah Indonesia menempatkan ekspor sebagai hal yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekspor barang dan jasa menjadi penyumbang kedua terbesar bagi pertumbuhan ekonomi. Banyak pengamat yang menilai bahwa Indonesia memiliki nilai produksi dan nilai ekspor yang cukup tinggi salah satunya dari komoditi perkebunan, yaitu kelapa sawit.

Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit merupakan salah satu komoditi sektor perkebunan yang jumlah volume eksportnya tinggi dan juga merupakan salah satu penghasil devisa bagi Indonesia diluar minyak dan gas, peranan CPO dinilai cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Minyak kelapa sawit merupakan salah satu minyak yang paling banyak dikonsumsi dan diproduksi di dunia. Minyak yang murah, mudah diproduksi dan sangat stabil ini digunakan untuk berbagai variasi makanan, kosmetik, produk kebersihan, dan juga bisa digunakan sebagai sumber biofuel atau biodiesel.

CPO diproduksi di Asia, Afrika dan Amerika Selatan karena pohon kelapa sawit membutuhkan suhu hangat, sinar matahari, dan curah hujan tinggi untuk memaksimalkan produksinya. Dan termasuk Indonesia sebagai negara tropis, maka dari itu pohon kelapa sawit tumbuh

dengan baik di Indonesia, dan produksi minyak sawit dunia pun didominasi oleh Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini secara total menghasilkan sekitar 85-90% dari total produksi minyak sawit dunia. Pada saat ini, Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak sawit yang terbesar di seluruh dunia dan sudah sejak lama minyak kelapa sawit Indonesia merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia dalam perdagangan Indonesia dengan negara-negara lain, dan Tiongkok sendiri merupakan salah satu negara terbesar pengimpor minyak kelapa sawit dari Indonesia.⁵

Dengan adanya ACFTA peluang pasar Tiongkok ke Indonesia dalam bidang ekspor impor mengalami peningkatan, begitu pula sebaliknya. Salah satu yang mengalami peningkatan adalah ekspor CPO dari Indonesia ke Tiongkok. Dengan adanya peningkatan volume ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok mengindikasikan potensi Tiongkok sebagai pasar ekspor CPO Indonesia. Pada akhirnya, kerjasama ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia selain itu dengan adanya zona perdagangan bebas seperti ACFTA yang membuat kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok semakin erat. Pada penelitian ini penulis akan berfokus pada pembahasan dampak kerjasama ACFTA terhadap naiknya angka ekspor Crude Palm Oil Indonesia ke Tiongkok.

KERANGKA TEORI

a. Perspektif: Liberalis

Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para

⁵“Komoditas Minyak Sawit”

<http://www.Indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak/sawit/item166>. Diakses pada tanggal 2 September 2018

individu.⁶ Individu dalam perspektif liberalis adalah konsumen, perusahaan atau wiraswasta individual.⁷

Adanya keterbukaan informasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia, maka halangan dan keterbatasan yang menghambat hubungan masing-masing negara menjadi semakin hilang. Begitu pula tuntutan masyarakat terhadap pengurangan hambatan perdagangan yang sering dilakukan oleh pemerintah pada masing-masing negara juga merupakan faktor yang cukup penting. Proses ini yang kemudian populer dengan istilah liberalisasi mencakup sektor perdagangan dan keuangan. Proses liberalisasi dalam perdagangan merupakan suatu proses untuk mempermudah perdagangan barang dan jasa dengan mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan.⁸ Liberalisasi dalam sektor perdagangan memberikan peluang bagi perusahaan dalam perdagangan internasional.

Dalam perdagangan internasional, tidak terlepas dari adanya asas keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo David Ricardo menyatakan bahwa ketika kedua negara yang berdagang mampu untuk memproduksi dua komoditi yang ada dalam pasar bebas, maka masing-masing negara dapat meningkatkan konsumsi komoditi tersebut dengan mengekspor barang hasil produksinya dan disisi lain dapat menerima manfaat seimbang dari negara lain dengan mengimpor barang hasil produksi lainnya yang tersedia di

negara lain tersebut.⁹ Teori ini digunakan untuk melihat apakah kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok merupakan perdagangan yang sehat dan seimbang antara kedua belah pihak.

b. Tingkat Analisa: Sistem Internasional

Tingkat analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tingkat analisa Sistem Internasional. Tingkat analisis menurut Kenneth N. Waltz adalah faktor-faktor penjelas. Tingkat analisis akan membantu penulis untuk menemukan variabel yang mana sangat menentukan tindakan aktor.

Pada dasarnya negara dan actor lainnya dalam hubungan internasional merupakan suatu unit yang terdapat dalam sistem yang lebih besar, yaitu sistem Internasional. Semua aktor hubungan internasional bertindak dan berinteraksi dalam hubungan tersebut. Sehingga menurut tingkat analisa ini, dinamika yang terjadi dalam sistem internasional berpengaruh terhadap perilaku para aktor hubungan internasional yang ada didalamnya. sistem yang lebih besar telah menentukan perilaku aktor sebagai unit terkecil dalam sistem tersebut.¹⁰

c. Teori Ekspor

Perdagangan Internasional dapat diartikan sebagai transaksi dagang antara subyek ekonomi negara yang satu dengan subyek ekonomi negara yang lain, baik mengenai barang ataupun jasa ataupun baik berupa ekspor dan impor. Faktor yang mendorong timbulnya perdagangan internasional suatu negara dengan negara lain adalah keinginan untuk memperluas pemasaran, memperbesar penerimaan pemerintah, adanya perbedaan permintaan

⁶ Mohammad Reza, "Teori Hubungan Internasional," Universitas Airlangga, dari : <http://mohammad-reza-fisip13.web.unair.ac.id> (diakses 28 Oktober, 2018)

⁷ Mohtar Mas' oed, Op.Cit., hal. 42

⁸ Soetatwo Hadiwigeno, "Globalisasi, Liberalisasi dan Daya Saing Sektor Pertanian," *Jep* Vol. 4, Nomor 2, (1999)

⁹ William Baumol J dan Alan S. Binder. *Economics: Principles and Policy*. South-Western Cengage Learning: Mason. OH. USA. 2009

¹⁰ Mohtar Mas, oed. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan metodeologi* (Jakarta: LP3ES. 1990). hlm 41.

dan penawaran antar negara serta perbedaan biaya relatif dalam produksi komoditas tertentu.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ekspor. Ditinjau dari sudut pengeluaran, ekspor merupakan salah satu factor terpenting dari *Gross National Product* (GNP), sehingga dengan berubahnya nilai ekspor maka pendapatan masyarakat secara langsung juga mengalami perubahan.¹¹ Tingginya ekspor suatu negara akan menyebabkan keguncangan atau fluktuasi yang terjadi di pasaran internasional maupun perekonomian dunia.

Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Untuk menganalisis perkembangan ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok, maka penulis menggunakan konsep kerjasama internasional.

Kerjasama Internasional adalah kerjasama yang dilakukan untuk mendukung perjuangan melawan segala bentuk pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan.¹² Kerjasama internasional juga dapat mengatasi segala bentuk agresi atau ancaman kedaulatan nasional, persatuan nasional atau integrasi teritorial, dan penolakan terhadap hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri dan hak setiap orang untuk melaksanakan kedaulatan sepenuhnya atas kekayaan dan sumber daya nasional.¹³

Kerjasama internasional adalah kerjasama yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing bangsa, untuk bantu membantu, mengatur batas-batas kekuasaan suatu

bangsa, tukar menukar utusan dan lain sebagainya. Kerjasama itu meliputi hubungan diplomatik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan lain-lain. pelaksanaan kerjasama ini ada yang diorganisir oleh PBB, kerjasama antar pemerintah seperti IGGI adapula berdasarkan perjanjian antar suatu negara dengan negara lain (perjanjian bilateral) seperti ACFTA, AFTA dan lain lain.¹⁴ Jadi kerjasama Internasional adalah kerjasama yang dilakukan oleh setiap negara untuk membangun hubungan antar negara yang bertujuan untuk saling membantu dalam segala aspek kehidupan. Kerjasama ekspor CPO yang dilakukan Indonesia dengan Tiongkok adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan kedua negara.

David Ricardo menyatakan bahwa ketika kedua negara yang berdagang mampu untuk memproduksi dua komoditi yang ada dalam pasar bebas, maka masing-masing negara dapat meningkatkan konsumsi komoditi tersebut dengan mengekspor barang hasil produksinya dan disisi lain dapat menerima manfaat seimbang dari negara lain dengan mengimpor barang hasil produksi lainnya yang tersedia di negara lain tersebut.¹⁵ Teori ini digunakan untuk melihat apakah kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok merupakan perdagangan yang sehat dan seimbang antara kedua belah pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)

Tiongkok merupakan salah satu kekuatan ekonomi dunia dan telah lama menjadi mitra dagang negara Indonesia dan juga ASEAN. Untuk meningkatkan hubungan perdagangan dengan Tiongkok, ASEAN menyepakati kerjasama

¹¹ Irham dan Yogi. 2003. *Ekspor di Indonesia*.

Jakarta: Binamas Presindo

¹² Y. Sri. T.D Haryo Tamtomo Dkk. IPS Terpadu Untuk SMP dan MTS Kelas IX Semester 2. 2007. hal. 109

¹³ Yusuf Sufri. Hubungan Internasional an Politik Luar Negeri. 1989. hal. 122

¹⁴ Mochtar Mas' oed. 1994. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES. Hal. 34

¹⁵ William Baumol J dan Alan S. Binder. *Economics: Principles and Policy*. South-Western Cengage Learning: Mason. OH. USA. 2009

perdagangan bebas yaitu *ASEAN – China Free Trade Area* atau ACFTA. ACFTA merupakan kesepakatan kerjasama perdagangan bebas antara ASEAN dan Tiongkok. Dalam kerangka perjanjian tersebut, negara-negara yang menjadi anggota perjanjian akan saling memberikan *preferential treatment* di tiga sektor, yaitu sector barang, jasa, dan investasi.

Melalui kerjasama perdagangan bebas ini diharapkan akan meminimalisir hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional sehingga dapat mempercepat aliran barang, jasa dan investasi. Kerjasama ini adalah bentuk perwujudan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat ASEAN dan Tiongkok. Dalam bidang ekonomi, selama beberapa tahun kerjasama perdagangan antara ASEAN dan Tiongkok telah mengalami banyak peningkatan. Sehingga muncullah ide untuk membentuk kerjasama ACFTA yang pertama kali dikemukakan oleh Perdana Menteri Tiongkok Zhu Rongji dalam ASEAN+3 *summit* di Singapura pada November 2001.¹⁶

Setelah itu dibentuklah suatu kelompok ahli dari kedua belah pihak yang disebut *ASEAN – China Expert Group*. Pada tahun 2002 kelompok ahli ini mengemukakan temuannya yaitu, bahwa pembentukan ACFTA dalam jangka waktu 10 tahun akan menciptakan kawasan ekonomi dengan populasi 1,7 milyar penduduk, dengan total GDP (*Gross Domestic Product*) regional mencapai 2 trilyun dolar AS dan total perdagangan diantara keduanya diperkirakan 1,23 trilyun dolar AS. Maka pada ASEAN-China *Summit* ke-6 tahun 2002 di Kamboja, para pemimpin ASEAN dan Perdana Menteri Tiongkok Zhu Rongji menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation*

between the ASEAN and the people's Republic of China. Kerangka kesepakatan ini merupakan landasan bagi kerjasama perdagangan dalam sebuah kawasan perdagangan bebas ASEAN-China yang ditargetkan bias dicapai pada tahun 2010 untuk ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand) dan pada tahun 2015 untuk ASEAN-CMLV (Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam).¹⁷

Pada 6 Oktober 2003 dilaksanakan perubahan protokol pertama *Framework Agreement* di Bali, Indonesia. Kemudian untuk perubahan protokol kedua ditandatangani pada 8 Desember 2006. ACFTA pertama kali diluncurkan sejak ditandatangani *Trade in Goods Agreement* dan *Dispute settlement Mechanism Agreement* pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos. Ada beberapa poin dari isi kesepakatan tersebut antara lain :

1. Membangun kawasan perdagangan bebas dalam jangka waktu sepuluh tahun berupa penghapusan hambatan-hambatan tarif dan non tarif dalam semua perdagangan barang-barang secara progresif.
2. Perundingan kawasan perdagangan bebas ASEAN-Tiongkok dengan potensi pasar sebanyak 1,7 milyar penduduk dan nilai produk *domestic bruto* antara US\$ 1,5 trilyun US\$ 2 trilyun; akan dimulai pada 1 Juli 2003 bersamaan dengan pelaksanaan perdagangan bebas (FTA).
3. Menyepakati kerangka perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif, untuk anggota lama ASEAN, yaitu

¹⁶ "PTRI ASEAN. ASEAN Plus Three. Kementerian Luar Negeri Indonesia" <http://www.kemlu.go.id/PTRI-ASEAN/en/Pages/ASEAN-Plus-Three.aspx>

¹⁷ Ali Fikri Wibowo. 2011. Pembentukan Asean China Free Trade Area (ACFTA) dan Hubungan ekonomi ASEAN – China. UIN Syarif Hidayatullah.

- Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei dan Singapura, pasar bebas akan mulai berlaku pada tahun 2010. Sementara untuk negara anggota ASEAN lainnya, yaitu Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar mulai berlaku 2015.
4. ASEAN dan Tiongkok akan mengurangi hambatan tarif dan non tarif secara progresif terhadap perdagangan barang sementara secara bebas bersamaan untuk melangkah pada upaya perdagangan bebas bagi produk jasa.
 5. ASEAN dan Tiongkok sepakat membangun rezim investasi yang terbuka dan komprehensif, yang didukung prosedur imigrasi yang lebih mudah. Tiongkok akan memberikan perlakuan tarif yang menguntungkan bagi tiga negara miskin ASEAN, yaitu Kamboja, Laos, dan Myanmar.
 6. ASEAN dan Tiongkok sepakat untuk mempererat kerjasama di lima sektor prioritas, yaitu pertanian, teknologi, komunikasi, informasi, pengembangan sumber daya manusia, investasi dan pembangunan sepanjang Sungai Mekong.
 7. Dalam jangka waktu 10 tahun bagi terwujudnya perdagangan bebas ASEAN-Tiongkok, Tiongkok menawarkan lebih awal sektor-sektor pertanian tertentu. Paket ini akan dilaksanakan pada tahun 2004.
 8. Penyelenggaraan KTT Sub-regional pertama negara-negara sekitar Sungai Mekong (*Great Mekhong Sub-regional*) di antara Vietnam, Kamboja, Myanmar, Laos, Thailand, serta Provinsi Yunan di Tiongkok Selatan dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan perkembangan di kawasan ini.
 9. ASEAN-Tiongkok sepakat untuk mengeksplorasi bidang-bidang baru serta mengembangkan langkah-langkah peningkatan kerjasama untuk memfasilitasi integrasi anggota-anggota ASEAN baru, yaitu Vietnam, Kamboja, Myanmar dan Laos untuk menjembatani ketertinggalan negara-negara tersebut.¹⁸

Hubungan Kerjasama Indonesia-Tiongkok

Hubungan kerjasama Indonesia - Tiongkok berawal dari kepemimpinan presiden Sukarno, tepatnya pada tanggal 9 Juni 1950, Indonesia resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Pembukaan hubungan diplomatik ini dilakukan beberapa bulan setelah terbentuknya Republik Rakyat Tiongkok. Pembukaan hubungan diplomatik Indonesia - Tiongkok menjadi awal dilakukannya berbagai perjanjian dan berbagai macam kerjasama antar kedua negara. Pada November 1953, perjanjian perdagangan Indonesia – Tiongkok pertama kali ditandatangani di Beijing. Dan ketika Konferensi Asia Afrika (KAA) pertama kali diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955, Tiongkok turut serta dalam konferensi ini dan langsung dihadiri oleh Perdana Menteri Tiongkok saat itu,

¹⁸https://asean.org/?static_post=asean-china-free-trade-area-2 diakses pada tanggal 2 Januari 2019

Zhou Enlai. Pada kunjungan ini, Zhou Enlai juga menandatangani perjanjian dwi kenegaraan Indonesia - Tiongkok. Hubungan diplomatik ini terus berlanjut dan diwarnai dengan saling kunjung antar pihak pemerintah.¹⁹

Setelah keruntuhan Soeharto, di bawah atmosfer politik yang lebih terbuka, etnis Tiongkok di Indonesia mulai mendapatkan perlakuan politik yang lebih baik, antara lain dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah yang menghapus kategorisasi 'pribumi' dan 'non-pribumi' pada tahun 1998, penghapusan larangan penggunaan bahasa dalam kegiatan publik dan penekanan tentang penghapusan diskriminasi pada tahun 1999, penghapusan larangan untuk kegiatan publik berkaitan dengan agama, kepercayaan dan tradisi Tiongkok pada tahun 2000, dan penetapan perayaan Tahun Baru Imlek sebagai perayaan nasional Indonesia.²⁰

Pada era kepemimpinan Gus Dur hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok lebih membaik lagi dimana Gus Dur melakukan kunjungan negara dengan bermaksud untuk menarik para investor agar bersedia menanam investasi di Indonesia, dan Tiongkok menjadi negara yang istimewa dalam politik luar negeri Indonesia pada saat itu, selain itu juga Tiongkok sebagai negara pertama yang dikunjungi oleh Gus Dur dan berdampak pada laju peningkatan hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok yang berkembang pesat. Pada tanggal 1-3 Desember 1999, melalui kunjungan Gus Dur tersebut menjadi era baru dalam peningkatan hubungan bilateral kedua negara serta menjadi dasar pernyataan kerjasama ekonomi, politik dan keamanan.²¹

Tiongkok bersedia menyalurkan bantuan sebesar 5 miliar dolar AS dan memberikan fasilitas kredit sebesar 200 juta dolar AS untuk pembelian bahan makanan. Selain itu juga disepakati kerja sama keuangan, teknologi, perikanan, promosi kunjungan wisata dan kerjasama dalam bentuk *counter trade* di bidang energi melalui penukaran *Liquefied Natural Gas* (LNG) Indonesia dengan produk Tiongkok.²² Sedangkan mengenai urusan dalam negeri, Gus Dur melakukan terobosan demi mengangkat kaum minoritas khususnya etnis Tiongkok, seperti mencabut Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 dan diganti dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 6 tahun 2000 tentang hal agama, kepercayaan dan adat istiadat etnis Tiongkok. Maka dengan adanya peraturan resmi tersebut menjadi jalan bagi etnis Tiongkok untuk menghidupkan budaya mereka akan semakin terbuka. Gus Dur memandang para etnis Tiongkok memiliki potensi yang berarti untuk membantu pemulihan perekonomian Indonesia. Namun melihat situasi dalam negeri yang masih cenderung rasialis maka kecil kemungkinan etnis Tiongkok akan dengan mudah dan lancar turut berkecimpung dalam membantu perekonomian Indonesia. Sehingga menurut Gus Dur, sistem pemerintahan yang rasialis harus dihilangkan agar para pemilik modal yang rata-rata adalah elit Tiongkok dapat secara aman berinvestasi kembali di Indonesia.

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri hubungan kedua negara semakin erat dengan adanya kunjungan Perdana Menteri Zhu Rongji di Jakarta pada 2001 dan sebaliknya kunjungan Megawati ke Tiongkok pada 24-27 Maret 2002 telah menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan politik dengan Tiongkok.²³ Selain itu kerjasama antara

¹⁹ ibid

²⁰ I. Wibowo dan Syamsul Hadi. Op.Cit. hal. 56

²¹ Epran Aprianto. "Peran Abdurahman Wahid Dalam Politik Indonesia". Skripsi. UIN Raden Fattah Palembang. 2015

²² I. Wibowo dan Syamsul Hadi. Op.Cit. hal. 57-58

²³ Ibid

Indonesia dan Tiongkok terus berkembang dengan ditandatanganinya MoU (*Memorandum of Understanding*) untuk pembentukan forum energi kedua negara tepatnya pada tanggal 24 Maret 2002. Melalui kerjasama tersebut menjadi payung investasi Tiongkok di Indonesia dalam bidang energi.²⁴ Pencapaian kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok, antara lain dibuktikan dengan pembukaan konsulat jenderal baru di sejumlah kota yang ada di kedua negara. Indonesia juga menjual gas alam ke Tiongkok sejak tahun 2002 untuk pasokan provinsi Fujian dengan harga jual yang telah disepakati yaitu 2,4 juta dolar AS per ton dengan komitmen Indonesia yang berlaku selama 20 tahun.

Peningkatan hubungan Indonesia-Tiongkok mencapai klimaksnya dengan ditandatanganinya *Strategic Partnership Agreement* antara Indonesia-Tiongkok pada tanggal 25 April 2005, saat Presiden Hu Jin Tao berkunjung ke Indonesia. Kemitraan Strategis ini akan difokuskan untuk memperkuat kerjasama politik dan keamanan, memperdalam kerjasama ekonomi dan pembangunan, meningkatkan kerjasama sosial budaya, dan memperluas hubungan non-pemerintah. Ada tiga bidang luas yang dicakup dalam perjanjian kemitraan strategis ini, yaitu kerjasama politik dan keamanan, kerjasama ekonomi dan pembangunan serta kerjasama sosial budaya.²⁵ Sejak penandatanganan deklarasi strategis ini hubungan kedua negara semakin berkembang pesat bahkan pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono telah merencanakan target

²⁴Christin Sinaga. Lidya. 2010. “*Memaknai Tahun Persahabatan Indonesia-Tiongkok*”, dalam www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/politikin/ternasional/324-memaknai-tahun-persahabatanindonesia-tiongkok/ diakses tanggal 21 Januari 2019

²⁵Djafar. Zainuddin. “*Indonesia, ASEAN & Dinamika Asia Timur. Kajian Perspektif Asia Ekonomi-Politik*”. (Jakarta: Pustaka Jaya. 2008)hal. 126

baru yaitu adanya kerjasama maritim pada Desember 2006, serta adanya perjanjian ekstradisi dengan Tiongkok pada Juli 2009. Pada sebuah kesempatan di dalam pertemuan bilateral APEC (*Asia-Pasific Economic Cooperation Economic Leaders Meeting*) di Singapura, November 2009. Presiden SBY, dan tahun 2010 merupakan tahun persahabatan bagi Indonesia sendiri.²⁶

Setelah memimpin selama dua periode, SBY kemudian digantikan oleh presiden Jokowi. Di era kepemimpinan Jokowi, hubungan Indonesia- Tiongkok menjadi semakin dekat jika dibandingkan dengan kepemimpinan presiden-presiden Indonesia sebelumnya. Di era kepemimpinan Jokowi, Tiongkok memiliki posisi penting dalam politik luar negeri Indonesia. Berbagai macam perjanjian dan kerjasama dilakukan dengan Tiongkok pada era kepemimpinan Jokowi terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Dari sektor ekonomi dan perdagangan, hubungan kerjasama kemudian diperluas lagi dalam berbagai bidang.

Sejarah *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia

Kelapa sawit pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah Belanda pada tahun 1848, saat itu ada 4 batang bibit kelapa sawit yang dibawa dari Mamitius dan Amsterdam kemudian ditanam di kebun Raya Bogor. Pada tahun 1911, kelapa sawit mulai dibudidayakan secara komersial. Perintis usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah Adrien Hallet (orang Belgia). Bididaya yang dilakukannya diikuti oleh K.Schadt yang menandai lahirnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia mulai berkembang. Perkebunan kelapa sawit pertama berlokasi di Pantai

²⁶ Sahid Gitosardjono. “*Hubungan Indonesia Tiongkok era kebangkitan Asia*” Lembaga kerjasama ekonomi. sosial budaya Tiongkok. 2006.hal. 54

Timur Sumatera (Deli) dan Aceh. Luas areal perkebunan mencapai 5.123 Ha. Pada tahun 1919, Indonesia mengekspor minyak sawit sebesar 576 ton dan pada tahun 1923 mengekspor minyak inti sawit sebesar 850 ton. Pada masa pendudukan Belanda, perkebunan kelapa sawit maju pesat sampai bisa menggeser dominasi ekspor Negara Afrika waktu itu. Memasuki masa pendudukan Jepang, perkembangan kelapa sawit mengalami kemunduran. Lahan perkebunan mengalami penyusutan sebesar 16% dari total luas lahan yang ada sehingga produksi minyak sawit pun di Indonesia hanya mencapai 56.000 ton pada tahun 1948 / 1949, pada hal pada tahun 1940 Indonesia mengekspor 250.000 ton minyak sawit.²⁷

Pada tahun 1957, setelah Belanda dan Jepang meninggalkan Indonesia, pemerintah mengambil alih perkebunan (dengan alasan politik dan keamanan). Untuk mengamankan jalannya produksi, pemerintah meletakkan perwira militer di setiap jenjang manajemen perkebunan. Pemerintah juga membentuk BUMIL (Buruh Militer) yang merupakan kerja sama antara buruh perkebunan dan militer. Perubahan manajemen dalam perkebunan dan kondisi sosial politik serta keamanan dalam negeri yang tidak kondusif, menyebabkan produksi kelapa sawit menurun dan posisi Indonesia sebagai pemasok minyak sawit dunia terbesar tergeser oleh Malaysia. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan perkebunan diarahkan dalam rangka menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sektor penghasil devisa negara. Pemerintah terus mendorong pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Sampai pada tahun 1980, luas lahan mencapai 294.560 Ha dengan produksi CPO (*Crude Palm Oil*) sebesar 721.172 ton. Sejak itu lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia berkembang pesat terutama perkebunan

rakyat. Hal ini didukung oleh kebijakan Pemerintah yang melaksanakan program Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN).²⁸

Perkembangan Ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia

Hanya beberapa industri di Indonesia yang menunjukkan perkembangan secepat industri minyak kelapa sawit selama 20 tahun terakhir. Pertumbuhan ini tampak dalam jumlah produksi dan ekspor dari Indonesia dan juga dari pertumbuhan luas area perkebunan sawit. Didorong oleh permintaan global yang terus meningkat dan keuntungan yang juga naik, budidaya kelapa sawit telah ditingkatkan secara signifikan baik oleh petani kecil maupun para pengusaha besar di Indonesia (dengan imbas negatif pada lingkungan hidup dan penurunan jumlah produksi hasil-hasil pertanian lain karena banyak petani beralih ke budidaya kelapa sawit).

Mayoritas hasil produksi minyak kelapa sawit Indonesia diekspor. Negara-negara tujuan ekspor yang paling penting adalah RRT, India, Pakistan, Malaysia, dan Belanda. Walaupun angkanya sangat tidak signifikan, Indonesia juga mengimpor minyak sawit, terutama dari India dan Tiongkok.

Dampak Kerjasama ASEAN-China *Free Trade Area* Terhadap Perkembangan Ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok

ASEAN – China *Free Trade Area* (ACFTA) memberikan banyak dampak terhadap perkembangan perekonomian wilayah ASEAN lainnya termasuk Tiongkok. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah ekspor dari Indonesia dalam bidang *Crude Palm Oil*.

²⁷ Fauzi. Yan. 2012. Kelapa Sawit. Jakarta: Penebar Swadaya

²⁸ Ibid

4.3.1 Peningkatan Produksi *Crude Palm Oil* Indonesia

Industri perkebunana dan pengolahan kelapa sawit merupakan salah satu industri penting bagi perekonomian Indonesia. Sawit merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia dan menjadi salah satu komoditas perdagangan utama Indonesia di pasar Internasional. Ekspor CPO merupakan salah satu penghasil devisa penting bagi Indonesia. CPO merupakan komoditas yang sangat diinginkan pasar dunia, sehingga industri pengelolaan kelapa sawit memberikan kesempatan kerja yang besar bagi tenaga kerja di Indonesia. Industri ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mendominasi pasar Internasional minyak kelapa sawit bersama Malaysia. Total minya kelapa sawit dari Indonesia dan Malaysia menguasai 85% hingga 90% dari total produksi minyak sawit di dunia.²⁹ Indonesia menjadi negara produsen dan eksportir terbesar di dunia diikuti oleh Malaysia yang berada pada posisi dua. Permintaan CPO dunia cenderung meningkat karena kebutuhan konsumsi dengan bahan baku CPO juga meningkat sejalan dengan pertumbuhan populasi dunia.

Tabel 1. Produksi *Crude Palm Oil* (CPO) tahun 2010-2015³⁰

Tahun	Luas Areal (HA)	Jumlah Produksi
2010	8.385.394	21.958.120
2011	8.992.824	23.096.541

²⁹Putri Wulandari. 2018. *Peningkatan Ekspor Crude Palm Oil Indonesia ke Rusia 2009-2013*. Unversitas Riau. Pekanbaru

³⁰ Direktorat Jenderal Perkebunan. 2015. "Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kelapa Sawit 2015". Jakarta

2012	9.572.715	26.015.518
2013	10.465.020	27.782.004
2014	10.754.801	29.278.189
2015	11.300.370	31.284.306

Sumber : Statistik Perkebunan *Indonesia Komoditas Kelapa Sawit 2015*

Untuk mengimbangi kebutuhan CPO dalam dan luar negeri pemerintah melakukan intensifikasi lahan sawit seluruh Indonesia, hal ini dilakukan agar jumlah poduksi dapat ditingkatkan, sehingga volume ekspor juga meningkat. Setelah diberlakukan secara resmi ACFTA permintaan CPO dari Tiongkok juga meningkat, hal ini tentunya juga dibarengi meningkatnya lahan dan jumlah produksi CPO Indonesia dari tahun ke tahun.

4.3.2 Peningkatan Peluang Pasar Ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia ke Tiongkok.

Dengan adanya ASEAN – China *Free Trade Area* (ACFTA) peluang pasar Indonesia ke Tiongkok tentunya mengalami peningkatan begitu pula sebaliknya. Salah satu komoditi yang mengalami peningkatan adalah ekspor *Crude palm Oil* (CPO) dari Indonesia ke Tiongkok. Dengan adanya peningkatan volume ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok mengindikasikan bahwa Tiongkok memiliki potensi yang besar sebagai pasar ekspor CPO Indonesia.

Tabel 2. Volume ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia ke Tiongkok

No	Tahun	Volume Ekspor (ribu ton)
1	2005	1.354,6
2	2006	1.758,6
3	2007	1.441,1
4	2008	1.766,9
5	2009	2.645,4

6	2010	2.174,4
7	2011	2.032,8
8	2012	2.842,1
9	2013	2.343,4
10	2014	2.357,3
11	2015	3.629,6

Sumber : kemendag.go.id 2017

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa setelah diberlakukannya ASEAN – China *Free Trade Area* (ACFTA) bila dirata-ratakan ekspor CPO dari tahun 2005 sampai 2009 sebelum berlakunya ACFTA hanya menyentuh angka rata-rata 1.794 ribu ton sementara pada tahun 2010-2015 setelah ACFTA secara resmi diberlakukan angka ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok menyentuh angka rata-rata 2.640 ribu ton. Naik sekitar satu juta ton.

Pada dasarnya banyak hal yang menyebabkan rata-rata ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok naik yaitu harga Internasional CPO, Produksi dan harga domestik CPO, nilai tukar Rupiah dan tentunya karena diberlakukannya ASEAN – China *Free Trade Area* (ACFTA). Sebelum diberlakukannya ACFTA ekspor *Crude Palm Oil* juga mengalami fluktuasi namun setelah diberlakukannya ACFTA rata-ratanya lebih tinggi.

KESIMPULAN

Dampak dari kerjasama ASEAN – China *Free Trade Area* terhadap perkembangan ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok memberikan dampak positif. Dapat dilihat melalui jumlah ekspor CPO ke Tiongkok setiap tahunnya relatif meningkat. Dengan adanya kerjasama ACFTA seyogyanya memberikan dampak positif bagi eksportir dan pengusaha CPO dalam negeri dengan terbukanya pasar ke Tiongkok yang lebih murah dikarenakan tanpa adanya pajak yang dipungut.

Tiongkok merupakan salah satu negara yang memiliki kebutuhan *Crude Palm Oil* cukup tinggi sehingga membutuhkan impor dari negara-negara dengan komoditas CPO yang besar seperti Indonesia. Kebutuhan yang tinggi akan kelapa sawit dan olahannya dan kepadatan penduduk serta pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi mengharuskan Tiongkok mengimpor CPO dari negara lain. Di sisi lain Indonesia menjadikan CPO sebagai salah satu komoditas ekspor untuk perekonomian negara sehingga kerjasama ini membawa keuntungan untuk kedua negara.

Faktor produksi yang berbeda antara Indonesia dan Tiongkok juga menyebabkan kedua negara melakukan kerjasama ASEAN – China *Free Trade Area* ini sehingga hubungan kedua negara ini dalam bidang perdagangan semakin erat. Tiongkok merupakan salah satu negara dengan industri terbesar sedangkan Indonesia kaya akan sumber daya alam, sehingga kedua negara ini saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri masing-masing.

ASEAN – China *Free Trade Area* (ACFTA) dibentuk untuk memperkuat perekonomian ASEAN dan Tiongkok melalui kerjasama perdagangan bebas untuk meminimalisir hambatan – hambatan yang terjadi dalam perdagangan Internasional sehingga dapat mempercepat aliran barang, jasa dan Investasi masing-masing negara. Kerjasama ini dibentuk sebagai perwujudan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Tiongkok.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mendapatkan keuntungan dari dibentuknya ACFTA ini. Hubungan Indonesia dengan Tiongkok memiliki akar sejarah yang panjang. Hubungan Indonesia dengan Tiongkok dimulai dari tahun 1950 sejak Moh. Hatta mengakui berdirinya Tiongkok. Semenjak itu kerjasama perdagangan Indonesia dengan Tiongkok

terus berlanjut sampai dibentuklah gagasan untuk membentuk ACFTA oleh Perdana Menteri Tiongkok.

Pertumbuhan ekspor CPO Indonesia terus mengalami peningkatan dan mengalami peningkatan yang cukup pesat setelah ACFTA resmi diberlakukan. Pada dasarnya banyak hal yang menyebabkan rata-rata ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok naik yaitu harga Internasional CPO, Produksi dan harga domestik CPO, nilai tukar Rupiah dan tentunya karena diberlakukannya ASEAN – China *Free Trade Area* (ACFTA). Sebelum diberlakukannya ACFTA ekspor *Crude Palm Oil* juga mengalami fluktuasi namun setelah diberlakukannya ACFTA rata-ratanya lebih tinggi..

Referensi:

Jurnal

Arisa Permata Siwi. 2013. *Bilateral Free Trade : Hubungan Perdagangan Indonesia-Tiongkok dalam Kerangka ACFTA* Vol.2 No.3, September 2013.

Adi Tiara Putri. 2011. *Implementasi ACFTA Dalam Hukum Indonesia*. Universitas Indonesia. Depok.

Ariawan. 2012. *Perjanjian perdagangan bebas dalam era liberalisasi perdagangan studi mengenai ACFTA yang diikuti oleh Indonesia*. Universitas Indonesia. Depok

Eka Ratnawati. 2011. *Analisis Data Saing Ekspor Crude Palm Oil Indonesia di Pasar Internasional*. Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Gumilar Rusliwa Somantri. 2005. *Memahami Metode Kualitatif*,

Makara Sosial Humaniora. Vol.9 No.2, Desember 2005

Koesmawan. *Penentuan Jenis Komoditas Ekspor Indonesia ke Tiongkok: Pemanfaatan Hubungan Perdagangan Indonesia Tiongkok*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis No. Jilid 7

Musilikhati dan David. 2010. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 8, No 2*

Vica Herawati. 2014. *Analisis pengaruh ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA) Terhadap Kinerja Keuangan Yang Dilihat Dari Penjualan Pada UKM Tekstil Di pekalongan*. Universitas Diponegoro. Semarang.

Yola Velinda Sari. 2017. *Pengaruh ACFTA terhadap ekspor kelapa sawit dan karet alam ke China periode 2006-2014*. Universitas Brawijaya. Malang

Keputusan Presiden

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of Tiongkok* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2014 tentang pencabutan surat edaran presidium Kabinet Ampera nomor

SE-06/PRES.KAB/6/1967, tanggal
28 Juni 1967

Hingga Kini. Semarang: Mutiara
Wacana

Buku

Arifin. Samsul. Djaafara, Rizal A dan Budiman, Aida S *Masyarakat Ekonomi ASEAN: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2009

Bakry. Umar Suryadi. 2015. *Ekonomi Politik Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Budiono. Kusumohamidjojo. 1987. *Hubungan Internasional. Kerangka Analitis*. Jakarta: Bina Cipta.

Budi Wibowo dan Adi Kusrianto. 2010. *Menembus Pasar Ekspor Siapa Takut*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Dougherty. J dan Robert. L. 1997. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jackson. Robert dan Georg Sorensen. 2013. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Masoed Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES

Purba. Murad. 2009. *Peranan Ketentuan Asal Barang dalam Perdagangan Bebas*. Jakarta : Direktorat Kerjasama Multilateral Departemen Perdagangan Republik Indonesia.

Paulus. Hariyono. 2006. *Menggali Latar Belakang Stereotip dan Persoalan Etnis Tiongkok di Jawa dari Jaman Keemasan, Konflik Antar Etnis*

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. CV. Alfabeta.

Setiawan. Sigit. 2012. *ASEAN- China FTA: Dampaknya terhadap ekspor Indonesia ke China*. Buletin Ilmiah perdagangan. Vol. 9 No 2

Yuyun Suria Sumantri. 1998. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Laporan

Direktorat Jendral Kementerian Perindustrian RI. 2012. *Perkembangan Kerjasama ASEAN di Sektor Industri*

Direktorat Jenderal Perkebunan. 2015. *Statistik Perkebunan Indonesia. 2010-2015*

Website

Achsani, Noer Azam. *Integrasi Ekonomi ASEAN+3; Antara Peluang dan Ancaman*. The Brighten Institute. <http://PPbrighten.or.id>

Association of Southeast Asian Nation. 2017. *ASEAN-China Free Trade Area*. http://asean.org/?static_post=asean-Tiongkok-free-trade-area-2

Association of Southeast Asian Nation. 2017. *Memorandum-of-Understanding ASEAN – Tiongkok*. http://asean.org/?static_post=memorandum-of-understanding-between-the-association-of-southeast-asian-nations-and-the-people-s-republic-of-Tiongkok-on-cooperation-in-information-and-communications-technology

Eddy Cahyono. Tenaga Profesional Pada Kantor Kepala Staf Presiden. 2015. *Industrialisasi dan Transformasi Ekonomi*. Sekretariat Kabinet RI <<http://setkab.go.id/industrialisasi-dan-transformasi-e>>

Sekretariat ASEAN 2012. *Framework Agreement on Comprehensive economic cooperation between the ASEAN and the People's republic of Tiongkok*. (<http://www.asean.sec.org>)

Komoditas Minyak Sawit”
<http://www.Indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak/sawit/item166>.

Harga Rendah Pembeli CPO tidak Bertambah”<http://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20141021150009-92-7221/harga-rendah-pembeli-cpo-tidak-bertambah>

Association of Southeast Asian Nation. 2017.
http://asean.org/?static_post=memo-randum-of-understanding-between-the-association-of-southeast-asian-nations-and-the-people-s-republic-of-china-on-cooperation-in-information-and-communications-technology

Hubungan Bilateral Indonesia-Tiongkok Terus Meningkat”
<http://www.bappenas.go.id/node/116/2468/hubungan-bilateral-indonesia-Tiongkok-terus-meningkat/>

“*tradeattace report 2011*”<http://www.kemendag.go.id/id/view/trade-attache-report/116/2011/12>.

“*trade attache report 2012*”
<http://www.kemendag.go.id/id/view/trade-attache-report/116/2012/12>.

“melemahnya ekonomi Tiongkok dan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia”
<https://www.kemlu.go.id/uploads-pub/2572-CHN-2013-0140/>